



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

## Miliaran SPJ Fiktif di Kantor Wakil Rakyat

**K**EJAKSAAN Negeri (Kejari) Kabupaten Kaur menemukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kaur. Di kantor wakil rakyat itu pula ditemukan modus mencatut 37 nama tenaga honorer. Hingga negara dirugikan miliaran rupiah. Berikut laporan khusus minggu ini. Tim penyidik Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kaur memastikan bakal memanggil anggota DPRD Kaur yang menjabat di tahun 2023. Mereka bakal diminta keterangan terkait dengan anggaran perjalanan dinas tahun 2023 yang menyebabkan kerugian negara (KN).

Saat ini, tim penyidik Kejari Kaur tengah menyiapkan berkas untuk pemanggilan seluruh anggota DPRD Kaur tersebut tanpa terkecuali. Kemungkinan besar pemanggilan para mantan anggota DPRD tersebut bakal dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Pemanggilan anggota DPRD sekarang masih disusun rencananya. Namun pasti dipanggil untuk diminta keterangan terkait dengan aliran dana perjalanan dinas yang sekarang dalam tahapan penyidikan," kata Kajari Kaur Pofrizal SH, MH, melalui Kasi Pidsus Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH.

Meskipun dari hasil pengumpulan barang dan bukti, tim penyidik Kejari Kaur sampai dengan saat ini belum menemukan upaya melawan hukum dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas para anggota dewan. Akan tetapi, dari hasil audit temuan BPK kerugian negara juga ditimbulkan dari anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kaur periode 2023. "Hasil audit BPK, ada juga temuan dari anggota dewan. Namun ini tidak bisa kita jadikan landasan, makanya harus dilakukan pemanggilan dan pengembangan lagi," ujar Bobbi.

Bobbi menjelaskan, sampai dengan saat ini sudah beberapa anggota DPRD Kaur dan juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menitipkan uang pengganti kerugian negara. Total sudah ada sekitar Rp1 miliar uang yang terkumpul di rekening penampungan milik Kejari Kaur. Akan tetapi penitipan uang pengganti kerugian negara ini, tentu tidak akan bisa menghentikan perkara yang sedang bergulir.

Bahkan uang penitipan kerugian negara ini nanti akan disampaikan pada saat sidang telah berlangsung. "Sekarang sudah ada beberapa yang menitipkan uang pengganti kerugian negara, kita terima tapi tidak bisa menghentikan perkara," jelasnya.

Lebih lanjut, Bobbi menjelaskan dari hasil penghitungan kerugian negara yang mereka temukan dari upaya atau tindakan melawan hukum di Setwan Kaur ada dua sumber. Pertama adalah pencatatan 37 nama tenaga honorer dalam melakukan perjalanan dinas dengan kerugian negara Rp1,6 miliar. Kemudian perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh ASN Setwan Kaur dengan kerugian negara Rp 4,6 miliar.

"Kita sudah ada penghitungan sementara, namun masih akan tetap kita lakukan penghitungan ulang berdasarkan perbuatan melawan hukum," ungkapnya.

Tim penyidik Kejari Kaur, sekarang juga telah mengantongi nama-nama yang bertanggungjawab terkait dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut. Akan tetapi, masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa di ditangkap. Kemungkinan besar setelah penghitungan ulang KN, Kejari Kaur akan segera melakukan penetapan tersangka yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini. "Sesudah penghitungan KN, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM menanggapi kasus ini mengatakan Pemkab Kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Setwan Kaur. Apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksanaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksanaan," sampainya.

Sebagai informasi, Jumat, 24 Januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan pengeledahan di Setwan Kaur sebanyak 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan. (crl)